

PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA KAMPUNG DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KAMPUNG KERING DISTRIK NUME KABUPATEN PUNCAK JAYA Suatu Studi Pendidikan Non-Formal

Gimairon Wenda¹
Marlien Lapian²
Ventje Kasenda³

Abstrak

Artikel ini membahas tentang untuk mengetahui bagaimana Peran Kepemimpinan Kepala Kampung Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kampung Kering Distrik Nume Kabupaten Puncak Jaya, dan sekaligus untuk mengetahui kendala atau hambatan (kelemahan) yang dihadapi Kampung Kering dalam pelaksanaan program-program Peningkatan Kualitas Pembangunan masyarakat Kabupaten Puncak Jaya. Adapun indikator yang menjadi fokus penelitian Peran Kepemimpinan kepala kampung kering dalam Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Puncak Jaya adalah peningkatan Sumber Daya Manusia, Penyediaan Sarana dan Prasarana dan pengembangan potensi desa. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah Metode Observasi, Dokumentasi dan Wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kampung kering telah melaksanakan perannya melalui program-program peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan, penyediaan sarana dan prasarana desa. Pelaksanaan Pembangunan di kampung kering distrik nume terus ditingkatkan dengan terobosan-terobosan yang dilakukan sebagai upaya pemerintahan yang ada di kampung kering dengan tugas untuk merealisasikan setiap kebijakan yang ada serta keterlibatan setiap stakeholder untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan kampung kering dengan tahapan tahapan yang dibuat khususnya dalam mengoptimalkan pembangunan yang ada di kampung kering mengingat kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks sehingga peran pemerintah desa kering diharapkan dapat memberikan terobosan terobosan sebagai bagian yang terpisahkan dalam rancangan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah desa Kering melalui program dengan melihat potensi dan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembangunan.

Kata Kunci : Kepemimpinan, Pelaksanaan Pembangunan.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Kepemimpinan merupakan sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian termasuk didalamnya kewibawaan untuk dijadikan sebagai sarana rangkai meyakinkan yang dipimpin agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta rasa tidak terpaksa terhadap proses pembangunan di desa. Kepala Kampung adalah pemimpin yang dipilih secara demokrasi maupun tradisional oleh warga yang mana ia adalah seorang wakil perpanjangan tangan dari masyarakat untuk dapat mengatur, menjaga dan memotivasi warganya dalam proses pembangunan di desa, sehingga peran kepemimpinan kepala Kampung sangatlah berpengaruh terhadap maju mundurnya dan berkembang atau tidak berkembangnya suatu pembangunan di desa. Untuk itu dalam peraturan perundang-undangan juga telah mengatur dan berlandaskan pada undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah, selanjutnya Provinsi Papua sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang mana menyatakan harapan dari hasil pemekaran sesuai Undang-Undang No. 26 Tahun 2014 dan persetujuan Presiden menyatakan bahwa untuk memacu kemajuan Provinsi Papua pada umumnya serta Kabupaten.

Proses pembangunan dapat pula dilihat dari pembangunan nasional ini dapat dimengerti mengingat proses pembangunan nasional berarti pembangunan yang meliputi berbagai segi kehidupan masyarakat bangsa, baik bidang politik, pembangunan, ekonomi maupun hankam. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maka diperlukan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang meliputi pusat sampai ke daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai perpanjangan pemerintah pusat dalam proses pembangunan yang dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang ada di setiap daerah sampai di desa, tentunya ini merupakan bagian terpenting dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan secara umum baik secara langsung kepada masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan merupakan terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimana pada Pasal 78 ayat 1 mengatakan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan sarana-prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi desa serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Tentunya dalam pelaksanaan pembangunan menjadi tugas dari Kepala Desa dalam merealisasikan pembangunan yang akan dilaksanakan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 81 ayat 2 mengatakan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.

Pelaksanaan pembangunan di Kering dilaksanakan dengan mengikuti rencana kerja sebagai tahapan untuk pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan di desa Kering Distrik Nume tidak sesuai dengan harapan masyarakat kering dimana kepala kampung tidak mengikuti aturan dan mekanisme yang ada karena kepala kampung kering tidak membuat struktur organisasi dalam merealisasikan pembangunan ditambah juga dengan alokasi dana desa yang diberikan tidak dimanfaatkan oleh pemerintah kampung Kering yang pada dasar dananya dimaksudkan untuk melaksanakan pembangunan desa tapi tidak ada pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kampung kering. Tentunya dalam melaksanakan pembangunan peran kepala kampung sangat dibutuhkan dalam perencanaan, pengawasan, maupun evaluasi dari hasil pelaksanaan yang dilaksanakan oleh pihak penyelenggaraan pembangunan yang ada di kampung Kering.

Tinjauan Pustaka

Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

Peran serta dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan, dan

peran. Parwoto (dalam Soehendy, 1997:28) mengemukakan bahwa:

1. Keterlibatan dalam keputusan : mengambil dan menjalankan keputusan.
2. Bentuk kontribusi : seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain.
3. Organisasi kerja : bersama setara (berbagi peran).
4. Penetapan tujuan : ditetapkan kelompok bersama pihak lain.
5. Peran masyarakat : sebagai subyek.

Struktur Peran dibagi menjadi dua yaitu :

1. Peran Formal (Peran yang Nampak jelas), yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga.
2. Peran Informal (Peran tertutup), yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah peran-peran formal.

Seiring perkembangan zaman, kepemimpinan secara ilmiah mulai berkembang bersamaan dengan pertumbuhan manajemen ilmiah yang lebih dikenal dengan ilmu tentang memimpin. Hal ini terlihat dari banyaknya literatur yang mengkaji tentang dengan berbagai sudut pandang atau perspektifnya. Hasibuan tidak hanya dilihat dari bak saja, akan tetapi dapat dilihat dari penyiapan sesuatu secara berencana dan dapat melatih calon-calon kepemimpinan.

Menurut Hasibuan (2011:157), kepemimpinan adalah seorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam

mencapai suatu tujuan. Menurut Hasibuan (2011: 162), gaya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerja sehingga secara produktif untuk mencapai tujuan salah satu kepemimpinan harus bisa menunjukan kemampuannya. Kartono (2008:5-8), Berpedapat bawah Kepemimpinan merupakan salah satu antara kepemimpinan yaitu bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan. memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus,

1. Teknik persuasif dalam kepemimpinan pemerintahan, adalah strategi dalam pimpinan pemerintahan camat, bupati, gubernur, ataupun walikota membujuk bawahannya untuk bekerja lebih rajin. Bujukan dilakukan dengan lunak dan lemah lembut.
2. Teknik komunikatif dalam kepemimpinan pemerintahan, adalah strategi pemimpin dalam memperlancar pekerjaannya mencapai tujuan melakukan hubungan sesuai dengan kaidah ilmu komunikasi yaitu apa yang diinginkan oleh pemerintah sebagai jalan pemberi pesan sama dengan apa yang diterima bawahan dan masyarakat.
3. Teknik fasilitas dalam kepemimpinan pemerintahan, adalah strategi pemimpin dalam memberikan fasilitas pada bawahan atau masyarakatnya untuk memperlancar pekerjaan karena bawahan dan

masyarakat tersebut terikat oleh pemberian tersebut.

4. Teknik motivasi dalam kepemimpinan pemerintahan, adalah strategi pemimpin mendorong bawahan dan masyarakatnya bekerja serta membangun lebih rajin.
5. Teknik keteladanan dalam kepemimpinan pemerintahan, adalah strategi pemimpin pemerintahan untuk memberikan contoh atau teladan yang baik kepada bawahannya maupun masyarakatnya sendiri. Secara umum dapat dimaknai bawah kepemimpinan pemerintahan adalah kepemimpinan dalam pemerintah atau secara penerapan posisip- posisip kepemimpinan sehingga agar kepemimpinan mencapai tujuan sehingga, Menurut Pamudji (2009:52), berpedapat hubungannya dengan kepemimpinan mengemukakan macam-macam teknik kepemimpinan antara lain:
 - a. teknik pematangan/penyiapan pengikut;
 - b. teknik human relation;
 - c. teknik menjadi teladan;
 - d. teknik persuasi dan pemberian perintah;
 - e. Teknik penggunaan sistem komunikasi yang cocok;
 - f. Teknik penyediaan fasilitas.

Teknik yang dikemukakan oleh Inu Kencana dan Pamudji pada dasarnya adalah sama. Tetapi Kartini(2006:16) mengemukakan bahwa teknik kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan teknis serta sosial pemimpin dalam menerapkan teori-teori kepemimpinan pada praktik kehidupan serta praktik organisasi. Teknik kepemimpinan juga dapat dirumuskan sebagai cara bertindak pemimpin dengan bantuan alat-alat fisik dan macam-macam kemampuan psikis

untuk mewujudkan kepemimpinannya. Sehingga yang masuk ke dalam kategori teknik kepemimpinan adalah:

1. etika profesi pemimpin dan etiket
2. kebutuhan dan motivasi
3. dinamika kelompok
4. komunikasi
5. kemampuan pengambilan keputusan
6. keterampilan berdiskusi dan "permainan" lainnya

Menurut Siagian (2009:9), pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Menurut Deddy T. Tikson (2005:2), pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatory yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. Menurut Syamsi Yuswar Zainul Basri & Mulyadi Subri (2006:15), pembangunan adalah proses perubahan system di reencanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. pembangunan merupakan suatu keadaan tertentu ke keadaan yang dipandang lebih bernilai yang pada umumnya tujuan-tujuan pembangunan ialah pembinaan bangsa atau perkembangan social ekonomi.

Menurut Grig (2005:27), pembangunan merupakan suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana yang berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan. Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 ditegaskan bahwa dalam pembangunan

Desa adalah Desa membangun dan membangun desa yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan Kampung. Konsep pembangunan Desa dimana konsep membangun desa menunjuk pada pembangunan desa oleh pemerintah supra desa. Undang Undang No.6 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa adapun yang menjadi tujuan pembangunan desa yakni:

1. Pembangunan kampung bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung kering dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
2. Penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Pembangunan sarana dan prasarana kampung kering.
4. Pengembangan potensi ekonomi Desa.
5. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
6. Pembangunan kampung mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan social.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data, meneliti, dan menganalisis data. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana di gunakan karena ada beberapa pertimbangan. Pertama penyelesaian masalah akan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini digunakan secara langsung yang pada hakekatnya berhubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan dengan banyak orang dan pola pola yang dihadapi Moleong (2009:5). Penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata, data dan perilaku yang di amati.

Sedangkan menurut Kirk dan Miller dalam Moleong (1989:3), membatasi penelitian kualitatif yaitu sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dan kawasannya atau wilayah dengan berhubungan dan berinteraksi dengan orang – orang yang ada di wilayah yang akan menjadi objek penelitian.

Pendekatan kualitatif menekankan pada unsur manusia sebagai instrument penelitian maka akan mempermudah penyelesaian dengan kenyataan yang ada dilapangan, dalam penelitian ini juga peneliti membangun pendekatan dengan masyarakat sekitar dalam rangka mendapatkan informasi kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata, data dan perilaku yang di amati.

Peran kepemimpinan dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat di kampung kering distrik nume kabupaten puncak jaya yang meliputi agar untuk kepemimpinan melihat kualitas suatu penelitian perlu adanya pembatasan masalah yang diangkat, selain itu, perlu juga menyatakan secara khusus batas-batas masalah agar penelitian lebih terarah dan dapat memperoleh gambaran yang jelas kapan penelitian tersebut dianggap telah selesai. Menurut (Siagian, (2010: 47) fokus penelitian dimasukkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna untuk memilih data yang relevan dan data yang tidak relevan. Hal yang harus di perhatikan dalam penelitian kualitatif adalah masalah dan fokus penelitian, karena fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam

pengumpulan data sehingga dengan batasan ini peneliti akan fokus memahami masalah-masalah yang tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, adapun yang menjadi fokus penelitian adalah peranan kepemimpinan kepala kampung dalam pelaksanaan pembangunan di kampung Kering II Distrik Nume Kabupaten Puncak Jaya, adapun indikator-indikator menurut undang undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menjadi tujuan pembangunan antara lain:

1. Pelaksanaan pembangunan kepala kampung di kampung kering distrik berdasarkan undang undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana kampung kering.
 - b. Pengembangan potensi ekonomi kering.
2. Kendala kendala pelaksanaan pembangunan di kampung kering distrik Nume

Dalam penelitian ini pihak yang akan di jadikan informan adalah informan yang dipilih untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat sesuai dengan objek yang akan diteliti. Prosedur pengambilan informan awal selanjutnya dengan teknik snowball, yaitu mengambil satu orang kemudian diwawancarai yang selanjutnya bergulir kepada informan lain secara berantai sesuai dengan informan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala kampung
2. Sekertaris kepala kampung
3. Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat
4. Tokoh Masyarakat
5. Tokoh Agama
6. Masyarakat

Selanjutnya untuk memperoleh informasi secara mendalam serta lebih lengkap dari masyarakat dan lembaga yang terkait dengan administrasi pemerintahan desa dipergunakan teknik snowball sampling dimana penentuan jumlah informan penelitian berkembang dan bergulir mengikuti informasi atau data yang diperlukan dari informan yang diwawancarai sebelumnya. Maka dari itu, spesifikasi informan penelitian ini tidak digambarkan secara rinci namun akan berkembang sesuai dengan kajian penelitian.

Hasil Penelitian

Kepemimpinan merupakan bagian terpenting dalam tata penyelenggaraan pemerintahan desa yang ada di setiap daerah, pelaksanaan desentralisasi menjadi dinamika terpenting dalam membangun rancangan pembangunan secara berkelanjutan setiap tahun tentunya kewenangan tersebut menjadi kesempatan bagi setiap kampung untuk pelaksanaan pembangunan. Kepemimpinan merupakan sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian termasuk didalamnya kewibawaan untuk dijadikan sebagai sarana rangkai meyakinkan yang dipimpin agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta rasa tidak terpaksa terhadap proses pembangunan di kering.

Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 ditegaskan bahwa dalam pembangunan desa adalah desa membangun desa yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa. Konsep pembangunan kering pada dasarnya untuk masyarakat di mana dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 adapun yang menjadi tujuan pembangunan yakni segala sesuatu

yang menjadi kebutuhan desa maka dengan melihat masyarakat kering yang kompleks adapun yang menjadi tujuan pelaksanaan pembangunan kampung kering. Kepala kampung adalah pemimpin yang dipilih secara demokrasi maupun tradisional oleh warga yang mana ia adalah seorang wakil perpanjangan tangan dari masyarakat untuk dapat mengatur, menjaga dan memotivasi warganya dalam proses pembangunan di kering, sehingga peran kepemimpinan kepala kampung kering sangatlah berpengaruh terhadap maju mundurnya dan berkembang atau tidak berkembangnya suatu pembangunan di desa dalam hal ini peneliti menggali berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut:

Kepemimpinan kepala kampung ditinjau dari pembangunan sarana dan prasarana dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa tentunya dibutuhkan kerjasama dari semua pihak dalam pelaksanaan yang akurat dan tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku di Negara Indonesia dengan standar pelaksanaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Negara. pembangunan sarana dan prasarana yang ada di desa kering kabupaten puncak jaya menurut Kepala kampung NK” menurut bapak pembangunan sarana dan prasarana desa mengikuti aturan dan mekanisme yang ada terutama anggaran dimana anggaran yang didapat dikelola berdasarkan prosedur yang ada dan diadakan musyawarah pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat Kampung kering.

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan tentunya dibutuhkan kerjasama dari semua stakeholder untuk melaksanakannya terutama administrasi yang akuntabilitas dan profesionalitas

mewujudkan pembangunan yang akan dilaksanakan. Pembangunan yang ada di desa kering menurut Sekretaris Desa NL” menurut bapak kepemimpinan kepala kampung desa kering dalam prioritas pembangunan selalu membangun sinergitas dengan segenap komponen pemerintahan desa sehingga pelaksanaan sesuai dengan waktu dan kebutuhan masyarakat. Efektivitas penyelenggaraan pembangunan desa pada dasarnya mengarah pada pembangunan infrastruktur desa sehingga alokasi anggarannya selalu mengarah pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur berikut adalah hasil wawancara dengan kepala pemberdayaan masyarakat desa AK” menurutnya kepemimpinan kepala desa kering telah berjalan dengan sesuai dengan aturan yang berlaku dan mekanisme yang ada dimana pekerjaan yang dilakukan selalu melibatkan masyarakat meskipun transportasi menjadi kendala dimana dalam merealisasikan setiap teknis pembangunan yang dilakukan selalu menghadapi hambatan karena pada dasarnya bahan bahan yang digunakan dalam proses pembangunan sering terlambat.

Berikut juga adalah hasil wawancara dengan masyarakat desa kering MK” dimana menurut beliau kepemimpinan kepala desa kering sudah baik ini nampak dari pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun dan masyarakat selalu aktif dalam setiap tahapan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada.

Peran kepala kampung membawa dampak yang sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas sehingga kesejahteraan masyarakat akan lebih terlihat mengingat setiap desa memiliki alokasi

anggaran yang sangat menggiurkan. Peran kepala desa dalam pembangunan desa menjadi langkah kongkrit pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang tepat sasaran dan akurat.

Berikut adalah hasil wawancara dengan salah satu masyarakat LJ” menurutnya peran kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai implikasi kemajuan yang patut dihargai dari segi pembangunan berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang diharapkan tinggal pembenahan penambahan kualitas akses yang perlu diperhatikan lagi akan tetapi pembangunan yang dilaksanakan dilihat sudah cukup baik dan selesai dan sesuai dengan prosedur yang ada.

Berikut juga adalah hasil wawancara dengan masyarakat MJ” beliau mengatakan kepemimpinan kepala desa sudah baik ini dapat dilihat dari konsep perubahan yang sudah ada, implikasi dan pelaksanaan juga terlihat secara jelas peran masyarakat dalam berkejasama dengan pemerintah desa. Pelaksanaan dan perencanaan pembangunan khususnya keterlibatan kepala desa dalam tata penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelaksanaan pembangunan harus sistematis dan sesuai dengan standar yang diinginkan berikut adalah hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yang ada di desa kering KD” dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh kepala kampung masih perlu diperhatikan lagi akses akses yang perlu dipandang untuk diperbaiki karena itu menjadi hal terpenting untuk memudahkan masyarakat desa dalam pengelolaan hasil alam yang ada di desa kering. Hal senada juga dikatakan oleh tokoh masyarakat yang ada di desa kering dimana menurut beliau dalam pelaksanaan pembangunan

desa di rasahkan cukup baik dengan berbagai pembangunan yang telah dilaksanakan oleh kepala kampung. Peran serta dan kepemimpinan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan menjadi indikator keberhasilan yang dicapai disetiap tahapan penyelenggaraan pembangunan desa berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan adapun yang menjadi kesimpulan dalam pembangunan sarana dan prasarana desa yakni peran kepemimpinan kepala desa sudah baik ini dapat dilihat dari proses, standar, mekanisme yang dilaksanakan oleh kepala kampung desa kering tinggal pembenahan pembenahan akses akses tertentu dalam pelaksanaan pembangunan yang harus di perhatikan lagi disambil itu juga perluh dalam pembangunan keterlibatan masyarakat terlihat ada dan selalu dirumuskan lewat musyawarah dalam setiapa pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Kesimpulan

1. Peran pembangunan sarana dan prasarana kering yakni peran kepemimpinan kepala kampung kering sudah dilihat dari proses, standar, mekanisme yang dilaksanakan oleh kepala kampung kering tinggal pembenahan pembenahan akses akses tertentu dalam pelaksanaan pembangunan yang harus di perhatikan lagi disambil itu juga perluh dalam pembangunan keterlibatan masyarakat terlihat ada dan selalu dirumuskan lewat musyawarah dalam setiapa pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan.
2. pengembangan potensi ekonomi kering yakni peran pemerintah Nampak jelas dengan berbagai kegiatan akan tetapi administrative

pengelolaannya harus ditingkatkan lagi agar Nampak jelas dan seksama kesejataran serta peningkatan pendapatan masyarakat.

3. Kendalah yang dihadapi dalam Pelaksanaan pembangunan akses transportasi yang memakan waktu dimana setiap tahapan berdasarkan pola hari tidak sesuai dengan waktu yang diharapkan.
4. Peran kepemimpinan kepala kampung untuk meningkatkan potensi kampung kering distrik nune terus ditingkatkan dengan terobosan - terobosan yang dilakukan sebagai upaya pemerintahan yang ada di kepala kampung kering akan tetapi dalam merealisasikan setiap kebijakan yang ada diperlukan keterlibatan setiap stakeholder untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan kampung kering.

Saran

1. Pembangunan di kampung nune harus ditingkatkan lagi dengan pembangunan secara keseluruhan dengan melihat kebutuhan masyarakat pada umumnya sehingga akses untuk mengelolah kebutuhan khususnya pendapatan masyarakat akan tiadk terselesaikan yang dengan rasah bertagung jawab harus merealisasikan.
2. Potensi masyarkat kampung kering harus ditingkatkan lagi dengan berbagai program khususnya pemberian bantuan kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada sehingga kesejatraan masyarakat akan meningkat.
3. Harus dibuat tahapan tahapan yang khususnya dalam merealisasikan pembangunan yang ada di balai kampung kering mengingat kebutuhan masyarakat yang semakin

- kompleks kemudian peran pemerintah kering diharapkan dapat memberikan terobosan terobosan sebagai bagian yang terpisahkan dalam rancangan rancangan yang dibuat oleh stakeholder khususnya pemerintah Kering.
4. Potensi Kampung Kering merupakan bagian yang terpisahkan dari sumber daya alam yang ada di Distrik Nume tentunya bagian yang terpisahkan dari Kabupaten Puncak Jaya dengan bentangan hutan yang luas tentunya perhatian pemerintah provinsi dalam melihat kebutuhan pemerintah yang semakin luas memberikan sumbangsi yang sangat luas dimana pemerintah provinsi papua merupan daerah otonomi khusus dengan berbagai kebutuhan yang harus di perhatikan.
 5. Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kampung kering, perlu di buat strategi yang dapat memberikan memanut bagi masyarakat kampung kemudian peningkatan pembangunan perlu dibuat dengan berbagai program - program yang dapat memberikan nilai mutu bagi semua elemen masyarakat yang ada di kampung kering.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisubrata S.W.1999, Otonomi Daerah Di Era Reformasi. Jakarta : Rineke Cipta.
- Bugin B dan H Iranto, 2003.Pokok-Pokok Penting Tentang Wawancara, Raja Grafindo, Jakarta.
- B.S Muljana. 2001.Teori pembagunan.Yogyakarta: PT. Uhindo dan Offset
- Bogdan dan Taylor dalam Moleong.2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT:RosdaBahri
- C.S.T. Kansil, 2002, Pengantar Ilmu Pemerintahan, PT: Armico Bandung
- Danim, sudarwan, 2004.Motivasi, kepemimpinan dan efektifitas kelompok. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Effendi, Bachtiar. 2002. Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan (Cetakan Pertama). Yogyakarta: PT. Uhindo dan Offset
- Hoesein, Bhenyamin.1999," Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II". Deserti Universitas Indonesia. Jakarta.
- Kaho,R.1982.Anali saHubungan Pemerintah Pusat Dan Daerahdi Indonesia.Yogyakarta. Rineke Cipta.
- Kaho. J. 2002 .Mencari bentuk otonomi daerah. Jakarta Rineke Cipta.
- Kansil, C. S. T. 1979. Pokok-Pokok Pemerintaha di Daerah. Yakarta Baru.
- Pamudji, S., 1995.Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia.Jakarta.BumiAksara.
- W. Wijaya, 2004, Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli bulat danutuh,Penerbit PT Raja Grafindo
- Sumule A. 2003, Mencari Jalan Tengah Otonom Khusus Provinsi Papua.Jakarta PT:Gramedia pustaka UTAMA.
- Djamarah, Syaiful.Bernadine R. Wirjana, M.S.W dan Prof. Dr. Susilo Supardo, 2006, Kepemimpinan, Dasar-Dasar Dan Pengembangannya. CV. Andi offset. Yogyakarta.
- Zulkarimen Nasution, 2007.Komunikasi Pembangunan (Pengenaln Teori dan Penerapannya). Yang Menerbitkan PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

SUMBER SUMBER LAIN:

- Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
- Undang undang nomor 9 tahun 2014 tentang peemrintahan daerah

EKSEKUTIF

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan
Volume 2 No. 2 Tahun 2018
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN : 2337 - 5736

Undang undang nomor 21 tahun 2014 tentang otonomi khusus